

KEULAMAAN DAN SIKAP KEWARGAAN Pada Masyarakat Minoritas Muslim di Kota Manado

Eva Latipah

Massa Bela Islam 212 memperingati dua tahun aksinya dengan melaksanakan reuni akbar di Monumen Nasional (monas), Jakarta, pada Minggu 2 Desember 2018. Gerakan yang diinisiasi oleh Rizieq Shihab dan sejumlah tokoh ini menamai gerakannya sebagai Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹ Ulama menjadi elan penting dalam setiap aksi keagamaan yang berjilid-jilid tersebut dan menjadi pemantik untuk melakukan aksi serupa di berbagai daerah di Indonesia. Dalam aksi bersama tersebut emosi umat Islam dimanfaatkan oleh figur-figur baru yang pada akhirnya mengklaim sebagai otoritas agama.²

Dalam khazanah Islam Indonesia, ulama menempati posisi sangat penting. Ulama memiliki otoritas tidak hanya di bidang keagamaan, tetapi juga di bidang sosial (Zulkifli 2013) dan politik (Varol, 2016). Melalui pesantren yang didirikan dan penguasaan terhadap kitab kuning, ulama bertindak sebagai penerjemah doktrin-doktrin Islam yang otoritatif dan sekaligus sebagai jembatan dari proses transmisi nilai-nilai keagamaan yang panjang; atau meminjam istilah Clifford Geertz (1959-

1 Tempo.com, 16 Desember 2018.

2 Tempo.com, 3 Desember 2018.

1960, 228-249) sebagai pialang budaya (*cultural broker*) antara tradisi besar dengan tradisi kecil dalam Islam. Melalui peran ulama itulah Islam kemudian dipraktikkan dalam kerangka sistem sosial budaya Muslim Indonesia yang beragama (Jajat Burhanuddin dan Ahmad Baedowi 2003).

Keberadaan para ulama sangat berpengaruh terhadap perilaku sosial-keagamaan masyarakat (Zulkifli 2013). Oleh karena dogma klaim kebenaran, dakwah (dalam Islam) cenderung menjadi stimulan timbulnya perilaku intoleran. Konflik-konflik atas nama agama di tanah air menimbulkan pertanyaan mengenai kontribusi para ulama untuk membangun suatu peradaban yang kuat lagi santun bagi suatu masyarakat mejemuk seperti Indonesia. Selain sebagai rujukan keilmuan, para ulama juga berperan sebagai perekat persatuan diantara perbedaan (Rubiyannah & Darajat 2017).

Otoritas ulama terletak pada ilmunya, akhlaknya, dan peranan mereka dalam mengajarkan atau menyebarkan agama Islam (Sirelkhatim 2015). Seorang ulama, pada saat yang sama, bisa saja seorang pedagang seperti halnya Al-Ghazali yang seorang pedagang permadani. Ulama bukanlah golongan yang digaji sekalipun sumber utama penghidupannya bisa berasal dari aktivitasnya sebagai *muballigh*. Sejalan dengan itu agama Islam disebarkan tidak saja oleh para ulama, tetapi juga oleh orang-orang biasa dengan pengetahuan agama yang terbatas, misalnya sekedar menjalankan beberapa cara beribadah atau membaca ayat-ayat al-Qur'an. Islam disebarkan juga oleh para bapak dan ibu biasa, yang hanya mengajarkan Islam kepada anak-anak mereka.

Sejatinya ukuran disebut ulama bukan hanya pada penguasaan ilmu-ilmu agama secara mendalam, tetapi juga penerapan nilai-nilai Islam dalam laku kehidupan sehari-hari (Machasin 2011). Ulama merupakan spesialis agama yang mengetahui tentang tradisi ilmiah tentang keyakinan dan perintah-perintah hukum (Ottappilakkol 2007). Namun, ulama sudah tentu adalah mereka yang mendalami ilmunya tentang ajaran-ajaran Islam, sekalipun orang itu bisa seorang tentara atau

pedagang. Dengan mengajarkan Islam itu, ulama pada dasarnya berperan sebagai golongan yang ikut serta membentuk sistem nilai, sistem kelembagaan dan perilaku masyarakat. Pengertian itu timbul terutama karena sifat agama Islam sendiri yang tidak hanya urusan ritual, tetapi juga sosial dan politik. Apa yang dilakukan oleh ulama, bukanlah hanya menggiring orang pergi ke masjid, tetapi juga membentuk suatu umat (Rahardjo 1996).

Seiring perkembangan zaman kriteria keulamaan makin lentur dan beragam. Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk mendalami ilmu-ilmu keislaman, seseorang harus menguasai bahasa Arab dengan baik. Di zaman sekarang, seseorang dapat saja mempelajari Islam dengan banyak membaca buku-buku agama dalam bahasa Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Dengan banyak membaca buku-buku itu ditambah dengan kepandaian berceramah, seseorang lambat laun akan disebut *ustaz* atau *Kiai* di masyarakat. Selain itu ada juga organisasi-organisasi yang mengatasnamakan ulama seperti *Nabdlatul Ulama* (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), namun jika diperhatikan para pengurusnya, tidak jarang ditemukan orang-orang yang secara tradisional tidak bisa dianggap sebagai ulama. Ada pula orang-orang yang lebih suka menyebut diri mereka sebagai cendekiawan Muslim, yang dalam kenyataan justru berperan seperti ulama (Mujiburrahman 2008).

Posisi dan peran ulama pada masa sekarang mengalami pergeseran seiring waktu dan perkembangan sosial budaya dalam masyarakat, terutama dalam pengertian ulama, kualitas keilmuan, dan ketokohnya (Zaman 2002). Penilaian masyarakat tentang kualitas ulama masa dahulu sangat berbeda dengan sekarang. Perbedaan sudut pandang terhadap penyebutan status ulama di masyarakat hari ini disamakan dengan *ustaz* atau tokoh agama. Padahal ulama dalam pengertian sebenarnya yakni orang yang menguasai *al-'ulūm al-dīniyyah* yakni ilmu-ilmu yang menggunakan bahasa Arab sebagai alatnya, seperti tafsir, nahwu, menguasai ilmu tasawuf (*islamic morality*; Muhtarom 2005). Hal ini akan memengaruhi pandangannya terhadap banyak hal, baik itu isu-isu

keagamaan maupun tentang tata kehidupan kewarganegaraan dan kebangsaan, bagaimana seorang ulama menyikapi soal kepemimpinan non-Muslim, pandangannya terhadap landasan konstitusi yakni Pancasila dan UUD 1945, tentang demokrasi, dan isu-isu perempuan.

Riset ini akan menggali lebih mendalam tentang pandangan dan sikap kewargaan (*citizenship*) ulama di wilayah minoritas Muslim yakni Manado. Hal ini akan dilihat berdasarkan empat komponen yaitu anti-toleransi, prosistem, toleransi, dan pro kewargaan. Ini menjadi menarik untuk membaca karakteristik ulama di kota yang dikenal dengan ‘seribu gereja’ ini.

PROFILING ULAMA MANADO

Berdasar hasil survei, ulama Manado sebagai responden survei ini memiliki identitas sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1

Identitas Ulama Manado sebagai Responden

VARIABEL	KATEGORI													
USIA	20 – 40 tahun						41- 65 tahun							
	12 orang						18 orang							
JENIS KELAMIN	Laki-laki						Perempuan							
	4 orang						24 orang							
LATAR BELAKANG	Pesantren						Tidak Pesantren							
	6						24							
JENJANG PEND.	SMA			Strata-1			Strata-2			Strata-3				
	4 orang			9 orang			10 orang			7 orang				
ORGANISASI KEAGAMAAN	NU	Muh	PPM	Kem	ABI	JII	SIAM	WS	Par	RMNH	BKPRMI	Syl	MUI	LPTQ
	10	5	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1

Keterangan:

NU: Nahdatul ulama; Muh: Muhammadiyah; PPM: Pemuda Peduli Masjid; Kem.: Kemasjidan; ABI: Ahlul Bait Indonesia; JII: Jemaat Islam Indonesia; SIAM: Studi Islam Assalam; WS: Wahdah Sulut; Par.: Parmusi; RMNH: Remaja Masjid Nurul Huda; BKPRMI: Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia; SyI.: Syarikat Islam; MUI: Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Utara.

Berdasarkan hasil survei, para ulama Manado menerima konsep kewargaan (*citizenship*). Ulama yang menerima kewargaan dapat dikategorikan ke dalam empat karakteristik yakni: ulama moderat, ulama inklusif, ulama progresif, dan ulama konservatif. Selain menerima, ada juga ulama yang bersikap eksklusif sebagai indikasi dari menolak (*reject*) kewargaan. Ada juga yang tidak menerima dan tidak menolak kewargaan (tidak teridentifikasi). Tidak ada ulama Manado yang menunjukkan sikap ekstrem dan radikal terhadap sikap kewargaan. Selanjutnya dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2.

Karakteristik Ulama Manado terhadap Kewargaan (*citizenship*)

No.	Kategori	Sikap Kewargaan	Presentase (%)
1	Moderat	Menerima	36, 67
2	Inklusif	Menerima	26, 67
3	Progresif	Menerima	13, 33
4	Konservatif	Menerima	10
5	Eksklusif	Menerima	3, 33
6	Radikal	Menolak	-
7	Ekstrem	Menolak	-
8	Tidak teridentifikasi	-	10

Berdasarkan pada Tabel 2, ulama Manado yang menerima prinsip kewargaan sebanyak 90% (27 orang), dan sisanya (10% / 3 orang) dinyatakan tidak teridentifikasi sikapnya. Ulama yang bersikap menerima kewargaan lebih banyak dibandingkan dengan ulama yang menolak atau yang tidak jelas sikapnya mengenai prinsip kewargaan. Penerimaan ulama terhadap prinsip kewargaan ditunjukkan dalam beberapa dimensi yang meliputi sikap anti-kekerasan, prosistem, toleransi, dan prokewargaan. Selanjutnya penerimaan itu dapat dirangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3.

Penerimaan Ulama Berdasar Dimensi Kewargaan

No.	Dimensi	Presentase (%)
1	Anti kekerasan	100
2	Prosistem	96
3	Toleransi	90
4	Pro kewargaan	83

Berdasarkan pada tabel 3, 30 (dari 30 orang / 100%) ulama menyatakan anti kekerasan; 29 orang (dari 30 orang / 96%) ulama menyatakan prosistem; 27 orang (dari 30 orang / 90%) ulama menyatakan toleransi, dan 24 orang (dari 30 orang / 83%) ulama menyatakan pro kewargaan. Ini artinya bahwa semua ulama Manado menyatakan anti kekerasan, sementara terhadap dimensi prosistem, toleransi, dan pro kewargaan, para ulama Manado menunjukkan sikapnya yang beragam, yang secara berurutan sebanyak 29, 27, dan 24 ulama.

WAJAH BARU KEULAMAAN DI MANADO

Secara kuantitas jumlah umat Islam di Manado mengalami peningkatan. Data paling mutakhir yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa jumlah Muslim di Manado sebanyak 37,78%; sementara penganut Kristen 54,31%, sisanya beragama Katolik (6,91%), Hindu (0,43%), Budha (0,42%), dan Khonghucu (0,15%).³ Peningkatan ini diakibatkan oleh banyaknya jumlah imigran dari berbagai wilayah khususnya Jawa dan Sumatera. Manado memiliki daya tarik lebih setelah pemberlakuan statusnya sebagai kawasan ekonomi khusus⁴ dan Bitung masuk dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE), 10 tahun terakhir menjadi pusat aktivitas ekonomi Indonesia bagian timur, pintu globalisasi dan gerbang utama Asia-Pasifik. Konsekuensi dari meningkatnya jumlah umat Islam tersebut adalah makin ramainya aktifitas

3 BPS Sulawesi Utara, 2018.

4 Kawasan dengan batasan tertentu yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis wilayah serta diberikan fasilitas dan insentif khusus sebagai daya Tarik investasi (<http://kek.go.id/>)

keagamaan, komunitas-komunitas kajian keislaman, majelis zikir, dan ekspresi keberislaman di ruang publik, peningkatan simbol-simbol keagamaan seperti penggunaan pakaian Muslim, dan pilihan-pilihan konsumsi masyarakat yang berbasis syariah juga meningkat pesat. Kepemimpinan tentu dibutuhkan dalam menggerakkan komunitas ini, figur-figur baru kemudian muncul menghiasi panggung-panggung dakwah, khususnya ulama generasi baru.

Jika ditelusuri figur-figur baru yang muncul ini terbagi kedalam dua tipologi. Pertama, mereka yang punya basis keilmuan Islam karena menempuh pendidikan pesantren⁵, khususnya di Alkhairat⁶ Palu. Ada juga lulusan dari Mekah dan Madinah, tetapi figur ini rata-rata sudah *sepuh* dan aktifitas dakwahnya sangat terbatas.⁷ Kedua, figur muda, mereka ini tidak memiliki jejak keilmuan Islam yang mendalam,⁸ dan pada umumnya berlatar belakang ilmu eksakta.⁹ Mereka mendapatkan pemahaman tentang Islam dari ceramah-ceramah para dai di televisi dan YouTube dari Yusuf Mansur, Arifin Ilham, Felix Siauw, dan Aa Gym.¹⁰ Para ustaz muda ini mendapatkan tempat di kalangan kaum milenial Manado karena menggunakan retorika yang mudah dipahami dengan pendekatan khas anak muda, mobilisasinya melalui media

5 Data kuantitatif menunjukkan terdapat 6 (dari 30) orang ulama yang menempuh Pendidikan Pesantren/Madrasah Diniyyah di Manado. Sisanya (24 orang) tidak menempuh Pendidikan Pesantren.

6 Islam memperoleh tempatnya di Manado, sebagian besar melalui Alkhairaat (*abna'ul al-khairaat*). Hal ini dikarenakan dalam pandangan masyarakat Muslim Manado, Alkhairaat adalah bagian dari NU. Padahal tidak demikian halnya. NU dan Alkhairaat hanyalah sebagai mitra dalam mengawal dan melestarikan nilai-nilai dan tradisi *Ahlussunnah wal Jama'ah* (selanjutnya disebut Sunni). Alkhairaat maupun NU, keduanya adalah dua hal yang berbeda baik secara kelembagaan maupun secara organisatoris.

7 Data kuantitatif menunjukkan bahwa usia para ulama di Manado merentang dari 24 hingga 69 tahun. Para ulama yang sepuh-sepuh memiliki latar belakang pendidikan lulusan Mekkah dan Madinah.

8 Selaras dengan temuan kuantitatif penelitian ini, dimana 24 (dari 30) orang menyatakan tidak mengenyam Pendidikan Pesantren/Madrasah Diniyyah.

9 Data ini tidak diperoleh secara kuantitatif, melainkan dari wawancara kepada setiap ulama terpilih di Manado.

10 Hasil wawancara terhadap para ulama Millenial Manado pada tanggal 1-10 Oktober 2018.

sosial, dan ujungnya memperoleh pengikut yang banyak. Figur-figur muda ini menjadi otoritas baru di kalangan Muslim Manado.

Kini para ulama ini punya basis jemaah yang mayoritas datang dari kalangan muda, juga mengkoordinir majelis-majelis ta'lim di hampir keseluruhan masjid di Manado, program-program mingguan sampai bulanan dibuat untuk merekatkan solidaritas antarjemaah, kajian-kajian keislaman digiatkan, gerakan nasjum (bagi-bagi nasi bungkus untuk jemaah Jum'at), subuh bersama sampai kegiatan buka puasa sunnah senin-kamis dari masjid ke masjid. Aktivitas ini disupport banyak pihak dari kalangan pengusaha, pejabat sampai aparat keamanan kepolisian. Selain itu, untuk mewadahi anak-anak muda dibentuklah komunitas pengkajian Islam dengan tema-tema populis. Pada awal 2018 mereka berhasil mendatangkan ratusan anak muda milenial dari berbagai kabupaten di Sulawesi Utara, Gorontalo serta Palu dengan menghadirkan Ustaz sejuta *viewers* Hannan Attaki. Sesudah Hannan Attaki berhasil didatangkan, kemudian Felix Siauw yang diundang berikutnya, namun kegiatan ini dibatalkan karena beberapa ormas memboikot kegiatan itu dan Felix Siauw juga tidak jadi hadir. Para ulama muda ini 'menenggelmkan' pamor para ulama sepuh yang lebih cenderung politis¹¹.

Ulama di Manado memiliki karakteristik yang berbeda dengan ulama di Jawa.¹² Ulama-ulama di Jawa pada umumnya lahir dan besar dengan berbasis pondok pesantren; sementara di Manado tidak demikian. Banyak ulama di Manado yang lahir dan besar tidak karena pondok pesantren yang mereka bangun, melainkan hanya pernah sebagai santri. Meskipun ulama di Manado sebagian besar tidak berbasis pesantren¹³,

11 Wawancara terhadap salah satu ulama Manado (Minggu, 7 Oktober 2018), pukul 15:55-21:00.

12 Salah satu perbedaan yang nyata adalah dalam penyebutan ulama. Di Manado sebutan yang lazim adalah ustaz, ada juga sebutan Kiai tapi jarang didengar dan baru muncul belakangan.

13 Hasil survey menunjukkan hanya 6 (dari 30) orang ulama yang menempuh Pendidikan Pesantren/Madrasah Diniyyah di Manado. Sisanya (24 orang) tidak menempuh Pendidikan Pesantren.

tetapi eksistensi mereka di mata umat relatif sama dengan ulama di daerah lain.

BERDAKWAH DI KOTA 'SERIBU GEREJA'

Kota Manado terletak di ujung pulau Sulawesi dan merupakan kota terbesar di belahan Sulawesi Utara sekaligus sebagai Ibukota provinsi. Secara geografis Kota Manado terletak di antara 1°25'88"-1°39'50"LU dan 124°47'00"-124°56'00" Bujur Timur, sedangkan batas administratif adalah sebagai berikut:

- ◆ Batas wilayah utara : Kabupaten Minahasa
- ◆ Batas wilayah timur : Kabupaten Minahasa
- ◆ Batas wilayah selatan : Kabupaten Minahasa
- ◆ Batas wilayah barat : Laut Sulawesi

Manado merupakan sebuah kota unik. Berbeda dari banyak kota di kawasan Indonesia lainnya, Manado memiliki hutan dan pantai yang mengelilingi wilayah urban. Letaknyapun di titik terluar bagian utara wilayah negara. Manado berpotensi tidak hanya menjadi pintu gerbang wilayah Indonesia dari sisi utara, tetapi juga menjadi kawasan wisata, bisnis, perdagangan, dan pertemuan antarorang dari berbagai latar belakang etnik dan kepercayaan. Jika berpergian ke kota ini, hal pertama yang tertangkap mata adalah banyaknya gedung gereja yang dapat dijumpai nyaris di setiap jalan utama dan pelosok-pelosok kota. Namun, umat beragama lain dapat hidup dengan tenang dan damai di kota ini. Bahkan, beberapa jam ke arah barat Manado, di tepi danau Tondano, terdapat sebuah perkampungan yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Kampung ini dikenal sebagai kampung Jawa. Penduduknya sudah turun temurun menghuni daerah ini.

Kota Manado adalah wilayah urban terbesar di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di kawasan timur Indonesia belahan utara dengan jumlah penduduk 395.515 jiwa.¹⁴ Pertumbuhan penduduknya cukup pesat yaitu rata-rata 3,04% per tahun dengan tingkat pertumbuhan alamiah (faktor kelahiran)

¹⁴ Data dari Badan Pusat Statistik provinsi Sulawesi Utara tahun 2018.

kurang lebih 1,50% per tahun. Faktor lain yang menyebabkan percepatan pertumbuhan jumlah penduduk adalah faktor urbanisasi (migrasi). Selain itu, kecenderungan migrasi sirkuler juga cukup tinggi, diperkirakan sekitar 40.000 orang berdomisili di luar kota melakukan aktivitas sehari-hari di kota Manado.

Komposisi penduduk kota Manado cukup heterogen baik latar belakang etnik, budaya, maupun agama. Mayoritas penduduk berasal dari etnis Minahasa, kemudian Sangehe Talaud, keturunan Cina, Arab, Bugis-Makassar, serta sebagian kecil etnis Mongondow. Selain itu pula terdapat penduduk pendatang dari etnis Jawa, Batak, Padang, Betawi dan lain sebagainya. Agama yang dianut adalah Kristen Protestan, Islam, Kristen Katolik, Advent, Pantekosta, Budha, Hindu dan Konghucu. Komposisi penduduk kota Manado berdasarkan agama yang dianut, sesuai data yang ada, menunjukkan mayoritas penduduk kota adalah beragama Kristen Protestan, kemudian penganut agama Islam, lalu Kristen Katolik, diikuti penganut agama Hindu dan penganut agama Budha. Jumlah penduduk kota Manado berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara pada tahun 2010 adalah 445.467 jiwa. Berdasarkan angka tersebut 57% adalah penganut agama Kristen Protestan, 31% beragama Islam, disusul Katolik 8%, Hindu 2,5%, dan Budha 1,5%.

Setelah jalan Trans Sulawesi terbuka (awal 1980-an) dan masyarakat transmigrasi mulai berkembang (1970-an), makin banyak pendatang dari Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Jawa yang beragama Islam memasuki wilayah Sulawesi Utara. Mereka datang dengan beragam tujuan. Di hampir seluruh wilayah di Sulawesi Utara, ada penduduk yang beragama Islam. Mereka bekerja di pemerintahan, dunia pendidikan, dan di sentra-sentra perdagangan kecil, pasar, atau pedagang kaki lima.

Berdasarkan data yang sama di Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 60% rumah ibadah di kota Manado adalah gereja Kristen Protestan, Masjid 26%, gereja Katolik 11%, vihara 2,5% dan Pura 0,5%. Dalam catatan sejarah kehidupan keagamaan, Manado dulunya didominasi oleh Kristen yang

kemudian mendominasi semua bidang kehidupan baik secara kelembagaan maupun aktifitas-aktifitas sosial. Mereka merasa dan menganggap bahwa agama Kristen lah agama asli orang-orang di daerah ini. Penganut agama Kristen atau Gereja pada umumnya masih beranggapan bahwa kota ini adalah daerah Kristen. Warga gereja tidak menemui tantangan berarti dan cenderung mendominasi dalam kehidupan bersama sebab jumlah mereka yang besar membuat masyarakat tampak homogen baik secara etnis maupun agama.

Kondisi semacam ini tentu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Muslim di kota itu, termasuk aktivitas kehidupan keagamaan. Memang tidak ada hal yang menjurus kepada konflik besar seperti yang terjadi di daerah lain, tetapi interaksi dan gesekan antaragama atau antaretnis (yang biasanya berbeda agama) bisa terjadi sewaktu-waktu yang dapat memicu konflik. Kondisi ini diperburuk dengan kenyataan makin berkembangnya kelompok-kelompok Kristen '*evangelical*' atau '*fundamentalis*' di Minahasa, juga golongan Pantekosta yang dikenal '*tertutup*' dalam pergaulan. Pada saat yang sama, agama Islam makin berkembang, demikian juga agama Hindu, Buddha, dan kini Kong Hu Cu (walaupun ketiga agama yang disebut terakhir belum signifikan). Semuanya adalah bagian dari dinamika perubahan dan perkembangan pluralitas di masyarakat. Mereka adalah warga masyarakat Sulawesi Utara.

Berbagai macam perlakuan diskriminasi yang dialami warga non-Muslim saat ini lebih khususnya di wilayah Jawa, sebut saja misalnya kasus penutupan gereja HKBP dan Yasmin, sangat berpengaruh terhadap pandangan warga Kristiani terhadap masyarakat Muslim. Kasus demi kasus lokal yang berhubungan langsung dengan hubungan antaragama (Islam dan Kristen) mulai terjadi, sentimen agama mulai menjadi menjadi isu, yang terbaru yaitu kasus tidak keluarnya izin penggunaan lapangan Sparta Tikala untuk dijadikan tempat pelaksanaan salat Idul Fitri pada 2013, lalu pembangunan Masjid Texas kota yang dipermasalahkan, hingga terjadi aksi massa baik itu yang mendukung dan menolak pembangunan

masjid tersebut. Peristiwa-peristiwa ini menjadikan kota ini rentan terhadap konflik antaragama (Sapriallah, 2016).

Melihat deretan persoalan di atas, para ulama di kota Manado memiliki tantangan besar dalam melakukan aktivitas dakwahnya, terlebih di daerah yang secara presentase Muslim merupakan minoritas. Agar tidak menimbulkan keresahan sosial, ulama dituntut mencari formulasi baru dalam mengembangkan dakwah yang cocok dengan kondisi sosial-keagamaan tempat dimana dakwah itu dilakukan.

Di masa-masa awal, perkembangan Islam di Sulawesi Utara mendapatkan tantangan yang luar biasa baik itu dari pemerintah maupun masyarakat. Ini disebabkan karena agama Kristen sudah begitu mengakar. Terdapat kekhawatiran akan adanya gerakan Islamisasi di Sulawesi Utara secara massif oleh para ulama seperti yang terjadi di wilayah Jawa atau Sumatera. Di beberapa kabupaten di Sulawesi Utara misalnya Bolaang Mongondow yang mayoritas penduduknya beragama Islam, aktivitas keagamaan (dakwah) sudah sangat maju, namun masih dalam lingkup lokal. Yang menarik perhatian adalah penyebaran penduduk kampung Jawa Tondano di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Sulawesi Utara, karena masyarakat kampung Jawa Tondano memang diakui mumpuni dalam penguasaan ilmu agama Islam. Hal itu tidak terlepas dari peran Kiai Modjo dan K.H. Ahmad Rifai yang saat di pengasingannya mampu mendakwahkan Islam di Minahasa. Keberhasilan itu tak lepas juga strategi dakwah keduanya dengan strategi adaptasi sosial melalui media kearifan lokal (Rahman Mantu 2015).

Perpindahan para murid dan keturunan Kiai Modjo dan Kiai Rifai yang paling besar adalah ke kota Manado, yang disponsori oleh Besari Maspekeh Imam pertama Masjid Mahawu,¹⁵ Ichwan dan Kosio, kemudian di Dumoga, Bolmong, Josonegoro, Rekso-
negoro dan Kaliyoso di Gorontalo. Anak keturunan Kiai Modjo

15 Mahawu Merupakan salah satu kampung di kecamatan Tuminting kota Manado. Kampung Mahawu ini merupakan daerah yang paling banyak dihuni oleh umat Islam sehingga kampung ini menjadi pusat dakwah Islam terbesar di Manado.

dan pengikutnya ini punya pengetahuan agama yang mumpuni sehingga mereka menjadi rujukan masyarakat Muslim berbagai daerah di Sulawesi Utara dan dari mereka inilah kemudian gerakan dakwah di Sulawesi Utara khususnya di kota Manado mulai berkembang. Selain anak keturunan Kiai Modjo, adapula pendatang dari beberapa daerah di Kalimantan, Makassar, dan Jawa ikut mengambil peran menyiarkan agama Islam. Mereka mendirikan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren serta Taman Pengajian Alquran di beberapa tempat di kota Manado sebagai lembaga untuk melahirkan ulama yang berpikiran inklusif. Dari lembaga-lembaga itulah para generasi pendakwah di kota Manado dilahirkan. Tf seorang dai muda¹⁶ menuturkan ada tantangan tersendiri berdakwah di tengah masyarakat yang multikultur. Tema-tema ceramah yang dibawakan sebisa mungkin tidak menyinggung umat beragama yang lain. Daerah ini menjadi titik perjumpaan berbagai agama, suku, serta lintas budaya. Oleh karenanya ajakan-ajakan untuk hidup berdampingan dengan rukun terus dilakukan dalam setiap kesempatan ceramah. Penggunaan teks ayat al-Qur'an dan hadis-hadis yang mengandung makna perdamaian menjadi sesuatu yang wajib dibacakan.

PANDANGAN TERHADAP KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM

Tantangan yang lebih besar dan tampak lebih menonjol dalam beberapa tahun terakhir ini adalah pelibatan agama dalam politik praktis (Ihsan Ali Fauzi dkk. 2018), khususnya di masa pemilihan kepala daerah maupun Presiden. Politisasi agama untuk keperluan politik praktis jangka pendek itu sebenarnya sudah lama terjadi (M. Iqbal Ahnaf 2014) termasuk di aras lokal. Dalam pilkada DKI pada 2016-2017 yang diikuti pilkada beberapa daerah pada tahun 2018, kecenderungan tersebut tampak menguat. Ada satu hal yang meningkat yaitu pandangan tentang keharusan memilih pemimpin Muslim di daerah-daerah mayoritas Muslim. Dengan kata lain, proses pilkada telah

16 Wawancara dengan Tf yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2018 pukul 17:34-21:15

mentransformasi sikap ulama dan juga Muslim secara umum tentang kepemimpinan di daerah minoritas Muslim.

Konteks demografi dan sosial-politik tentu berpengaruh terhadap sikap seseorang dalam merespon isu terkait dengan pilihan politik, tetapi pengaruh ini tidak signifikan dalam pandangan umum ulama di Manado. Dalam konteks kepemimpinan di Manado, yang mayoritas penduduknya beragama Kristen, kepemimpinan non-Muslim bukan pilihan utama; seperti yang diutarakan oleh salah seorang ulama muda berikut ini.

“Kalau saya sendiri untuk pemimpin ya, kalau masih ada Muslim yang adil dan baik, kita tetap memilih Muslim. Kecuali di tempat saudara-saudara yang lebih banyak non-Muslimnya, maka harapan kita tidak akan terjadi secara keseluruhan.”¹⁷

Keterangan ini menunjukkan sikap yang setengah hati, walaupun di daerah minoritas Muslim, memilih calon pemimpin sesama Muslim dipandang sebagai tanggung jawab atas kepentingan umat Islam. Artinya sikap memilih pemimpin berdasarkan faktor agama sangat kuat. Harapan hadirnya pemimpin Muslim juga gencar disuarakan dengan alasan agar umat Islam terbebas dari ancaman diskriminasi, sebagaimana dinyatakan salah seorang ulama berikut.

“Tidak bisa non-Muslim memimpin Muslim. Karena ini istilahnya serigala itu memimpin sekandang ayam. Gimana ceritanya itu, dimakan satu per satu. Sebaliknya gimana, sekandang serigala dipimpin oleh ayam.”¹⁸

Sikap ini menunjukkan adanya ketakutan berlebihan atas kepemimpinan non-Muslim yang dianggap membahayakan dan mengancam Muslim dalam aktifitasnya sebagai warga negara. Sikap tidak pro-demokrasi juga ditunjukkan oleh ulama yang lain. Menurutnya, agama menjadi syarat utama dalam memilih seorang pemimpin. Agama seorang pemimpin merupakan representasi agama masyarakat yang ia pimpin karena akan

17 Wawancara dengan RTI pada tanggal 2 Oktober 2018 pukul 21:00-22:10.

18 Wawancara Dengan Ustaz FS pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 16:05-17:30

berdampak terhadap kebijakan, ia mengungkapkan sebagai berikut.

“Bagaimana bisa istilahnya memberikan program-program yang mayoritas Muslim, sedangkan dia sendiri non, kalau non-Muslim itu diberikanlah istilahnya satu skalanya yang bidang-bidang seperti itu. Dalam skala seperti presiden itu karena kita mayoritas kita lihat juga sosoknya. Suatu kekhawatiran kita karena mungkin di dunia sekarang ini ya, mungkin dalam sejarah juga belum pernah ada negara yang mayoritas dipimpin oleh minoritas. Secara teori mungkin bisa, tapi pada praktiknya sulit pemimpin dari kalangan minoritas mampu berbuat adil pada masyarakat yang mayoritas”.¹⁹

Dari temuan di atas, terlihat sangat terang tidak terlalu kuat dukungan ulama di Manado terhadap kepemimpinan non-Muslim, walaupun politik lokal juga memengaruhi argumentasi para ulama ini. Hal yang tampak menonjol dari temuan tersebut adalah kuatnya pengaruh agama dan kepercayaan dalam membenteng wawasan dan sikap ideologis mereka. Bahwa sebagian ulama menerima kepemimpinan non-Muslim dengan banyak catatan yang pada intinya mengakomodir kepentingan Islam, namun secara paradok di sisi lain para ulama ini berargumen bahwa jika Muslim memimpin wajar jika kepentingan minoritas tidak menjadi prioritas. Ulama yang menolak juga banyak dipengaruhi motif agama. Tampak sekali adanya hubungan antara sesuatu hal yang sangat personal dengan urusan politik-ideologis.

POLITIK LOKAL DAN DEMOKRASI SEMU

Pandangan ulama di Manado secara keseluruhan menunjukkan sikap yang pro pada demokrasi. Salah satu informan, misalnya, mengatakan bahwa secara substansi demokrasi tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bahkan prinsip-prinsip dalam sistem demokrasi sudah sejak lama di praktikkan di dalam Islam, sebagaimana pernyataan berikut.

19 Wawancara Dengan Ustaz Jn pada tanggal 4 Oktober 2018 pukul 10:00-12:10

“Saya gak ada masalah ya sama demokrasi, istilahnya kan demokrasi sama saja kembali ke rakyat, istilahnya ya negara dan agama itu setara jadi pemahaman tentang kekuasaan Allah dan kekuasaan rakyat itu tidak berbenturan. Apalagi bicara tentang bangsa dan negara ya. Seseorang yang membela negara itu dianggap syahid dalam Islam. Bahkan salah satu naluri bagi saya mencintai itu mencintai bangsa kita sebagaimana kita mencintai ayah dan ibu. Berkaitan dengan demokrasi tadi, sistem di Indonesia ini tidak ada masalah, yang paling penting itu bagaimana kehidupan berbangsa dan bermasyarakat itu sesuai dengan apa yang kita harapkan.”²⁰

Alasan lain diterimanya konsep demokrasi dalam Islam menurutnya karena demokrasi telah menuntun ke beberapa bentuk dan sarana, yang hingga kini dianggap satu-satunya sistem yang memberi jaminan keselamatan bagi rakyat. Meskipun begitu, sistem demokrasi menurutnya juga tak luput dari kekurangan. Namun, sistem demokrasi menurutnya harus digunakan sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kemaslahatan walaupun informan lain menyebut ada beberapa peristiwa di Manado yang dianggap mencederai prinsip demokrasi dan keadilan. Informan itu mengaku pengalaman empirik sebagai minoritas di tengah mayoritas Kristen, mengalami perlakuan yang dianggapnya sebagai tindakan tidak demokratis. Misalnya, Ustaz FS menginformasikan bahwa saat Muslim hendak mengadakan acara yang bersifat terbuka di ruang publik, sering kali mendapat halangan bahkan perizinannya cenderung dipersulit. IPRA (Ikatan Pemuda Remaja Asslam) yang dibinanya juga kerap menerima laporan soal aktivitas ROHIS yang terbatas atau dibatasi oleh pihak sekolah, antara lain kurang mendapat dukungan fasilitas, dan pelajaran agama Islam diselenggarakan dengan cara menggabungkan siswa dari beberapa kelas sehingga tidak maksimal. Berbeda halnya dengan umat Kristiani ketika hendak menggelar acara, perizinan, menurut informan ini, dapat diperoleh dengan sangat mudah. Begitupun saat kelompok Muslim menyuarakan hak dan kebebasan, kerap dicap radikal, seperti menyuarakan sikap

20 Wawancara dengan Rtl pada tanggal 2 Oktober 2018 pukul 21:00-22:10.

anti-Ahok. Disamping itu, kelompok organisasi masyarakat yang dekat dengan Kristen seperti Brigade Manguni, dimana aksinya kadang mirip FPI, tidak mau dikategorikan sebagai kelompok radikal.

Dari seorang tokoh agama diperoleh informasi bahwa di pertengahan tahun 2014 terjadi kasus ancaman dari seorang warga Nasrani kepada seorang muadzin (petugas azan) salat subuh agar tidak mengumandangkan azan dengan pengeras suara.²¹ Masih di tahun yang sama, umat Islam di Manado secara tiba-tiba tidak diberikan izin oleh pemerintah kota Manado menggunakan fasilitas umum yakni lapangan sepakbola Sparta Tikala untuk melaksanakan salat Idul Fitri padahal setiap tahun di lapangan sepakbola tersebut digunakan umat Islam melaksanakan salat Idul Fitri yang menjadi bagian dari lokasi yang masuk dalam agenda PHBI (Peringatan Hari-Hari Besar Islam). Persoalan ini mendapat respon beragam dari para tokoh masyarakat dan agama.²²

Tidak hanya kasus-kasus tersebut, ada anggapan dari beberapa tokoh Islam bahwa kerukunan hidup umat beragama yang sedang giat-giatnya disosialisasikan dan dibangun oleh pemerintah sebagai sebuah proses 'Kristenisasi terselubung' kendati hal tersebut sulit dibuktikan. Sikap sebagian tokoh Islam tersebut (sebenarnya) bisa 'ditafsirkan' sebagai ungkapan kekecewaan terhadap peta politik dan pemerintahan di kota Manado. Adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan bahwa selama beberapa dasawarsa terakhir ini orang Islam tidak pernah menduduki posisi nomor satu atau minimal menempati pos-pos strategis pemerintahan di daerah ini sehingga ada anggapan bahwa orang-orang Islam sengaja dimarjinalkan dalam masalah politik-pemerintahan. Selain itu, penerimaan pegawai pada instansi pemerintahan yang berasal dari komunitas Muslim sangat terbatas sehingga hal ini makin menambah rasa kecewa dan terpinggirkan di kalangan Muslim.

21 Wawancara dengan salah seorang pengurus Masjid di Kelurahan Dendengan pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 18:12.

22 Wawancara dengan Ketua GP Ansor Sulawesi Utara Benni Rhandani, 6 Oktober 2018.

Secara substansial para ulama memberikan respon positif dan menerima sepenuhnya nilai dan prinsip demokrasi namun menurut mereka di tingkat lokal seperti Manado cita-cita ideal demokrasi belum sepenuhnya terwujud. Institusi-institusi politik di Manado juga belum banyak mengakomodasi kepentingan politik umat Islam. Sudah terbukti bahwa perilaku politik umat Islam tidak berbeda dengan kelompok lain. Kalau pemerintah bersikap tertutup terhadap kepentingan umat, ini bisa memancing perilaku inkonstitusional umat Islam, begitu juga sebaliknya. Maka, *power sharing* akan menjadikan umat Islam ikut bertanggung jawab dalam pemerintahan. Di beberapa periode sebelumnya sekretaris daerah dan sekretaris kota Manado di serahkan kepada orang Muslim, tetapi distribusi kekuasaan di tingkatan SKPD belum banyak mengakomodir Muslim. Kritik para ulama tentang hal ini sangat terdengar di telinga walau tidak disuarakan secara terbuka. Hasil proses politik kemudian menentukan lurah, camat, bupati, gubernur, izin pertunjukkan, monopoli sebuah komoditi, persetujuan caleg dan sebagainya. Masalah-masalah yang mestinya hanya soal teknis bisa jadi masalah politis. Politik lokal memengaruhi sikap dan perilaku demokratis ulama Manado.

A. Argumen atas Ideologi Pancasila

Ulama di Manado pada umumnya mengakui dan menerima Pancasila secara bulat tanpa syarat sebagai simbol perekat bangsa yang majemuk. Bagi mereka, Pancasila adalah pilar kesatuan dalam keragaman, dan prinsip dasar yang mempersatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Ulama yang masuk dalam tipologi ini menerima dan mendukung Pancasila secara bulat tanpa syarat sebab mereka berpandangan bahwa dalam dasar dan falsafah negara ini terdapat esensi nilai-nilai keislaman. Ulama yang mendukung pandangan ini kebanyakan berasal dari organisasi-organisasi keagamaan dengan basis nasionalisme kuat seperti NU dan Muhammadiyah. K.H. AR dari NU, misalnya, berpendapat bahwa “Pancasila merupakan ideologi semua rakyat Indonesia dan demokrasi sudah sangat

tepat diterapkan di Indonesia; “saya tidak setuju negara Islam karena tidak sesuai dengan konteks Indonesia”, tegasnya. Di Manado, peneliti tidak menemukan komentar ulama kelompok tertentu yang biasanya berkecenderungan tidak mendukung Pancasila sebagai ideologi dan tegas menyatakan syariat Islam adalah solusi.

Hal yang menarik dalam kaitan ini, sebagaimana terlihat di atas adalah bahwa argumen nasionalisme yang digunakan sebagai dasar dukungan terhadap Pancasila tidak semata-mata dimonopoli oleh ulama dengan basis sosial organisasi nasionalis. Ada juga ulama yang berasal dari lapis konservatif, yang menggunakan argumen kebangsaan/kebhinekaan untuk mendukung Pancasila. Ustaz My misalnya, mengatakan sebagai berikut.

“Tentu sistem negara yang kita inginkan bahwa kembali ke musyawarah atau tidak serta merta dengan voting dengan suara terbanyak seperti itu. Tetapi sesuai kesepakatan UUD itu yang kita laksanakan, kita harus taat pada aturan yang telah kita sepakati. Kita taat karena memang ini adalah hasil kesepakatan; Dan ketika kita memaksakan berdirinya khilafah, memaksakan sistem yang Islam, maka dikhawatirkan ada kehancuran yang lebih parah yang merugikan bangsa kita sendiri”.²³

Pernyataan ini menunjukkan ustaz My bersikap pro terhadap sistem negara-bangsa Indonesia dengan pendapatnya bahwa tidak mudah mencoba menggantikan ideologi Pancasila dengan sistem khilafah, karena fakta bahwa masyarakat Indonesia berasal dari berragam latar belakang sosial, politik, dan budaya. Ia memiliki pandangan bahwa bila dipaksakan, penerapan khilafah dan syariat Islam bisa menimbulkan kekacauan. Masih dalam konteks yang sama, agamawan muda TB juga menggunakan argumen kebhinekaan untuk menolak pemberlakuan atau penerapan syariat dan penegakan khilafah. Menurutnya, Pancasila merupakan ideologi seluruh rakyat Indonesia dan demokrasi sudah sangat tepat diterapkan di

23 Wawancara dengan Ustaz My pada tanggal 3 Oktober 2018 pukul 20:00-21:10.

Indonesia. Baginya Pancasila sudah final, adapun khilafah tidak diperlukan karena tidak cocok dengan konteks historis, kultural, dan politik Indonesia. TB menolak sistem khilafah karena dianggap sudah tidak relevan lagi saat ini. Selaras dengan TB, Ustaz Yq dari kelompok minoritas Ahmadiyah juga sangat tidak menyetujui adanya ide menjadikan syariat sebagai undang-undang resmi negara. Menurutnya, ide seperti itu tidak diperlukan karena negara telah cukup memfasilitasi penerapan esensi dari nilai-nilai syariat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Argumen fakta kebhinekaan digunakan tidak saja untuk mendukung Pancasila, tetapi juga untuk menolak ideologi lain selain Pancasila. Ibu SM, misalnya, menyatakan berikut.

“Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia bisa saja menjadi negara Islam, tetapi dilihat dari konstitusi (Pancasila dan UUD) kita, ternyata itu yang lebih tepat dalam kondisi sekarang karena masyarakat kita banyak suku dan agama.”

Ibu SM, sebagaimana disebut di atas menggunakan argumen kebhinekaan untuk mendukung Pancasila dan menolak diadopsinya ideologi dan sistem hukum lain seperti syariat dan khilafah. Menurutnya, Pancasila merupakan ideologi bagi segenap rakyat Indonesia, adapun demokrasi sudah sangat tepat diterapkan di Indonesia.

Ulama di Manado pada umumnya juga bersepakat untuk tidak mempertentangkan Pancasila dengan Islam. Mereka memiliki pandangan kuat bahwa Indonesia cukup sebagai negara Pancasila saja, tetapi tidak menjadi masalah seandainya nilai-nilai Islam tetap digunakan sebagai dasar atau panduan untuk mengamalkan setiap sila dari Pancasila.

Menurut Dokter TP, di Sulawesi Utara nilai-nilai Pancasila itu mewujudkan dalam kehidupan masyarakat, berikut pernyataannya.

“Untuk spesifik Sulawesi Utara itu dalam pengalaman saya, pengetahuan saya sudah cocok. Kalau ada case dimana kita tidak memiliki pandangan yang sama, misalnya soal Pancasila.

Kalau Pancasila itu kita disini lebih mementingkan pluralitas jadi kadang kala kita tidak mengikuti dari pusat. Contoh doa Bersama, kan ada fatwa dari MUI untuk doa Bersama itu dihindari pemuka agama, tapi kita disini memilih untuk tetap karena alasannya kita diminta dihargai, dan untuk menjaga hubungan antaragama. Tapi itu case, bahwa kita kadangkala dalam hal-hal tertentu biar cocok. Tapi untuk penerapan Pancasila, UUD 1945 jalan bagus dan keadaan cukup jalan. Kalau ada case-case saja”.²⁴

Informan ini memberi contoh kegiatan-kegiatan tahunan yang bernuansa keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi`raj, 1 Muharram yang selalu melibatkan orang-orang non-Muslim dalam penyelenggaraannya. Baik itu mereka sebagai tamu undangan atau adapula yang berpartisipasi secara langsung ikut mengggagas kegiatan tersebut. Ini sudah menjadi hal yang lug mrah dijumpai di kota ini. Ketika di daerah lain berdebat tentang boleh atau tidaknya mengucapkan selamat natal, beberapa organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Sarekat Islam di kota ini ramai-ramai membuat baliho dalam ukuran besar mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada umat Kristiani, tak tanggung-tanggung baliho itu dipampang di gereja-gereja besar yang ada di kota Manado. Saat umat Islam merayakan Idul Fitri pun hal yang sama dilakukan oleh umat non-Muslim, lembaga gereja, organisasi pemuda Kristen, Hindu dan Buddha juga turut mengucapkan selamat dan bersilaturahmi ke rumah-rumah umat Islam. Kondisi semacam ini tetap terjaga hingga sekarang. Penyesuaian materi-materi dakwah dengan kondisi daerah yang majemuk serta menjalin komunikasi dengan umat agama lain secara santun melalui dakwah yang dilakukan oleh para da`i merupakan strategi yang jitu dalam upaya mempertahankan nilai-nilai toleransi dalam bingkai *Torang Samua Basudara*.

ISU-ISU HAK PEREMPUAN

Keterlibatan perempuan dalam aktivitas di ruang publik menimbulkan berbagai tanggapan termasuk dari ulama. Banyak

²⁴ Wawancara dengan Dokter TP pada tanggal 7 Oktober 2018 pukul 17:30-21:10

ulama yang masih beranggapan bahwa tugas utama perempuan ialah mengurus rumah tangga dan laki-laki menjadi pemimpin. Adapun ulama yang lain beranggapan tidak ada salahnya perempuan bekerja dan menjadi pemimpin karena perempuan juga memiliki andil dalam menopang perekonomian keluarga dan di masa sekarang kita melihat fenomena itu sebagai hal biasa.

Pada tingkat praktis, konsep kewargaan seperti di atas terwujud dalam respon para ulama terhadap gerakan perempuan. Banyak para ulama di Manado yang pro terhadap eksistensi dan peran perempuan di ruang publik. Dari beberapa diantaranya ustaz AR salah seorang tokoh NU menyebutkan berikut.

“Ya semua punya hak yang sama. Dalam al-Qur’an Allah juga menentukan yang paling utama adalah taqwanya, yang membedakan laki dengan perempuan kan hanya jenis kelamin saja tapi hak dan kewajiban kan masing-masing ada.”²⁵

Menurutnya pembatasan hak-hak perempuan untuk melakukan aktivitas di ruang-ruang publik dengan menggunakan dalil dalam teks al-Qur’an adalah keliru, berikut pernyataannya.

“Itu yang para ustaz sekarang perlu diajarin lagi. Jadi sekarang itu yang perlu diajari itu para ustaz. Baca ayat, jelasin ayat tapi gak tau karakteristiknya. Ar rijalu qowwamuna ‘alan nisa’ itu kan jelas bicara dalam rumah tangga dan jelas ujungnya itu kan masalah nafkah. Setelah nafkah itu kan ujungnya pada siapa? pada anak-anak yatim piatu, nah itu jelas struktur berpikrnya ke arah sana. Jadi, jangan dipakai sepotong gitu lo. Uang dikasih setengahnya kan gak laku tapi kalo ayat dikasih setengah ke orang laku”.

Reinterpretasi terhadap teks al-Qur’an itu perlu dilakukan menurut Ustaz AR. Allah telah memberikan potensi yang sama pada laki-laki dan perempuan sehingga yang membedakan antara keduanya adalah kesempatan untuk mengembangkan potensi itu. Perempuan mempunyai hak untuk memegang

25 Ibid, wawancara dengan AR.

jabatan dalam pekerjaan apa pun, dibolehkan asal mereka sanggup dan mempunyai pengetahuan akan bidang-bidang itu, sebab dalam al-Qur'an telah tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan dari sumber yang sama, kedudukan laki-laki dan perempuan sama derajatnya dalam pandangan Allah SWT dan yang membedakan hanyalah ketakwaan.

RA, ketua Muhammadiyah Manado juga mengungkapkan hal yang sama dengan AR dari NU. Kepemimpinan perempuan di ruang publik tidak perlu dipersoalkan karena ditinjau dari sudut pandang normatif-teologis sudah jelas, ditambah lagi jika mencermati sejarah Rasul Muhammad SAW merepson kepemimpinan perempuan sebagai berikut.

“Ketika dalam sejarah ummu Hindun itu memimpin perang dan Nabi mengiyakan maka kemudian saya membaca juga beberapa referensi di Muhammadiyah, dilihat dari profesionalitasnya, keahliannya, kemampuannya. Kalau kemudian dia memiliki itu semua, why not? Tidak perlu ngotot ar rijalu qowammuna alan nisa’, bahwa laki-laki itu harus jadi pemimpin, tapi kemudian Nabi mendiamkan dan mengiyakan itu karena ketika dia memimpin terbelahlah pasukan musuh pada saat itu. Dan pada perang selanjutnya Nabi membiarkan”.²⁶

Keterangan-keterangan ini menunjukkan bahwa para ulama di Manado tidak bersikap patriarkis. Keikutsertaan perempuan dalam wilayah publik, menurut mereka, merupakan pilihan bagi perempuan sendiri, dengan kemampuan yang dimiliki, jasmani dan spiritual. Pada dasarnya ulama di Manado tidak melarang perempuan beraktifitas di ruang publik, menjadi dokter, pimpinan perusahaan, rektor, bahkan di IAIN Manado rektornya adalah perempuan, sampai pada tingkatan dekan di fakultas semuanya adalah perempuan. Banyak para calon anggota legislatif adalah perempuan termasuk mereka yang terpilih menjadi bupati dan walikota. Fenomena ini tidak menjadi persoalan bagi para ulama di Manado, dengan catatan perempuan itu memiliki integritas, kemampuan memimpin, punya karakter membangun dan bekal pengetahuan agama yang

26 Wawancara Dengan Rizal Arsyad

baik. Mereka bahkan mendorong perempuan untuk bergerak dan menyelesaikan masalahnya dengan baik, dan berani terbuka apabila terjadi diskriminasi seperti tindak kekerasan baik di ruang domestik maupun diruang publik. Ulama di Manado memberikan pemahaman tentang keterlibatan perempuan di ruang publik kepada masyarakat dengan cara mengangkat tema-tema perempuan dalam ceramah-ceramahnya.

KESIMPULAN

Pada umumnya ulama di Manado memiliki wawasan kebangsaan yang cukup kuat dan bersikap pro terhadap isu-isu kewargaan. Semua itu terkonfirmasi dari argumentasi dan sikap mereka terhadap kepemimpinan non-Muslim, isu-isu perempuan, demokrasi, serta landasan konstitusional pancasila dan UUD 1945. Sikap dan pandangan ini merupakan hasil dari pemahaman para elit agama lokal terhadap kompleksitas keberagaman masyarakat Manado. Hanya saja situasi politik nasional sepuluh tahun terakhir ini memengaruhi sikap para ulama sehingga respon atas satu persoalan akan dikaitkan dengan pilihan-pilihan politiknya. Di sisi lain, yang perlu diwasapadai adalah invasi kelompok-kelompok transnasional kedalam ormas Islam arus utama seperti NU dan Muhammadiyah dan tumbuhnya Islamisme di kalangan kaum muda Manado.

Dengan persentase Muslim yang kurang dari empat puluh persen penduduk, maka tantangan itu datang dari internal Muslim sendiri terutama terkait dengan keterlibatan ulama dalam politik. Jika para ulama masuk terlalu jauh dalam Islam politik, konsekuensinya adalah kemungkinan adanya benturan dengan kelompok milisi adat Minahasa. Perdamaian dan toleransi yang dirasakan selama ini bisa menjadi taruhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahnaf, M. Iqbal. 2014. *Politik Lokal dan Konflik Keagamaan*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Balai Pusat Statistik Sulawesi Utara, 27 Maret 2018.
- Burhanuddin, Jajat dan Baedowi Ahmad. 2003. *Transformasi Otoritas Keagamaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Fauzi, Ihsan Ali. 2018. *Agama, Kerukunan, dan Binadamai di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Machasin. 2011. *Islam Dinamis Islam Harmonis; Lokalitas, Pluralisme, Terorisme*, Cet. I. Yogyakarta: LkiS.
- Mantu, Rahman. 2015. "Memaknai Torang Samua Basudara: Manajemen Dakwah Berbasis Kearifan Lokal di Kota Manado." *Jurnal Potret Pemikiran* 19 (2).
- Muhtarom. 2005. *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mujiburrahman. 2010. *Mengidonesiakan Islam: Representasi dan Ideologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ottappilakkol, M. 2007. "The Role of ulama in the anti-colonial struggle of India-a case study of Malabar." Calicut: University of Calicut, tesis.
- Rahardjo, M. Dayan. 1996. *Intelektual Inteligensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan.
- Rubiyannah & Darajat, Deden, M. 2017. "The role of Ulama in maintaining religious tolerance in the region of South Tangerang and Depok City." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research. International Conference on Diversity and Disability Inclusion in Muslim Society (ICDDIMS)* 153.
- Saprillah. 2016. *Laporan Penelitian Konflik Rumah Ibadah di Manado* (belum dipublikasikan), Balitbang Makassar, 2016.

- Sirelkhatim, M. 2015. "Authority in Islam: the Institutionalization of Islam and the Elusive Transfer of Authority from Society to State." *Journal of Georgetown University-Qatar, Middle Eastern Studies Student Association* 2.
- Varol, F. 2016. "The politics of the Ulama. Understanding the influential role of the ulama in Iran." *Milel ve Nihal*. 13 (2): 129-152.
- Zaman, Mohammad Qosim. 2002. *The Ulama in Contemporary Islam: Suctodians of Change*. Princeton: Princeton University Press.
- Zulkifli, The Ulama in Indonesia. Between Religious Authority and Symbolic Power. *MIQOT*. XXXVII (1, Januari-Juni), 180-197, 2013.

WAWANCARA RESPONDEN

Taufik Bilfagih, tanggal 5 Oktober 2018.

Riton Igisani, tanggal 3 Oktober 2018.

Ustaz Faisal Sabaya, tanggal 3 Oktober 2018.

Ustaz Juenedi, tanggal 4 Oktober 2018.

Ustaz Muyassir, tanggal 4 Oktober 2018.

Taufik Pasiaq, tanggal 7 Oktober 2018.

Ahmad Rajafi, tanggal 2 Oktober 2018.

Rizal Arsyad, tanggal 6 Oktober 2018.

INTERNET:

<http://crcs.ugm.ac.id/annual-report-top>.

<https://nasional.tempo.co/read/1151743/panitia-reuni-212-sebut-pidato-politik-rizieq-di-luar-wewenang>

<https://nasional.tempo.co/read/1151061/rencana-reuni-212-begini-tanggapan-para-tokoh>

<http://ciptakarya.pu.go.id/profil/profil/timur/sulut/manado.pdf>.

ULAMA POLITIK DAN NARASI KEBANGSAAN

Demokratisasi pasca 1998 menyediakan panggung bagi aktor-aktor baru dari beragam latar belakang pendidikan, profesi, dan ideologi untuk ikut berkontestasi membicarakan kembali posisi Islam dalam negara dan masyarakat Indonesia. Aktor-aktor baru ini menawarkan diskursus dan *habitus* keagamaan baru serta mendorong isu-isu kemaslahatan publik dan interpretasi Islam ke dalam diskusi publik. Mereka membuka perdebatan seputar relasi agama dan negara yang sempat dianggap 'final' dengan beragam tawaran alternatif yang dipopulerkan melalui ruang-ruang publik, seperti sekolah, kampus, masjid, majelis taklim, radio, televisi, internet, dan media sosial. Namun, ini bukan berarti bahwa aktor-aktor keagamaan lama menarik diri dari panggung publik. Perkembangan di ruang publik menunjukkan kontestasi otoritas antar aktor-aktor keagamaan yang berebut pengaruh publik, dan negara dalam hal ini mengikuti dengan seksama diskursus yang berkembang di kalangan aktor-aktor yang disebut "ulama" ini untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan arah politik.

